



KR-Antara/Okky Lukmansyah

DITERJANG BANJIR BANDANG: Warga memperhatikan truk yang hanyut diterjang banjir bandang Sungai Kaligung, Desa Danawarih, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Selasa (11/1). Truk pengangkut galian pasir dan batu tersebut terseret banjir bandang Sungai Kaligung sejauh 150 meter dan mengakibatkan dua awak truk tewas tenggelam.

KASUS MASKAPAI GARUDA

Erick Thohir Laporkan ke Kejagung

JAKARTA (KR) - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melaporkan kasus keuangan yang melanda maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) kepada Kejaksaan Agung.

"Kami berikan bukti-bukti audit investigasi, jadi bukan tuduhan," kata Erick Thohir kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1).

Dalam laporan itu, Erick menyampaikan terkait rencana pemerintah yang ingin melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan Garuda Indonesia sekaligus memberikan sejumlah bukti tentang pembelian pesawat ATR 72-600. Sejak dua tahun terakhir, Garuda dilanda badai keuangan akibat salah kelola di masa lalu yang mengakibatkan utang perusahaan membengkak lebih dari Rp 140 triliun. Kementerian BUMN lantas

mengambil langkah restrukturisasi untuk menyelamatkan maskapai pelat merah itu. Erick menegaskan, Kementerian BUMN akan fokus melakukan transformasi agar Garuda bisa lebih akuntabel, profesional, dan transparan.

"Ini bukan sekadar penangkapan atau menghukum oknum yang ada, tetapi perbaikan administrasi menyeluruh," ujarnya.

Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin menyampaikan dukungannya terhadap upaya Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin membersihkan berbagai perusahaan pelat merah dari indikasi pelanggaran hukum, terkhusus Garuda

Indonesia.

"Kami sinkronisasi data dan kami berharap juga tidak hanya untuk kasus Garuda, tetapi juga kami dorong (pengembangan) kasus lain di BUMN," ucap Burhanuddin.

Saat ini, ada lebih dari 470 kreditur mengajukan klaim kepada Garuda Indonesia dengan batas waktu pada 5 Januari 2022. Mereka mengajukan klaim penagihan utang hingga 13,8 miliar dolar AS atau setara Rp198 triliun. Nominal itu merupakan data dari tim pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda Indonesia.

Setelah tahapan verifikasi selesai, tim PKPU akan memutuskan nominal yang valid dan dapat dimasukkan dalam proses restrukturisasi pada 19 Januari 2022 mendatang.

Manajemen Garuda mengajukan proposal guna mengurangi kewa-

ajiban lebih dari 60 persen melalui proses restrukturisasi dengan mengurangi kewajibannya dari 9,8 miliar dolar AS menjadi 3,7 miliar dolar AS. Proposal yang diajukan itu bertujuan membuat perseroan bertahan dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun.

Sebelumnya, mantan Komisaris Garuda Indonesia Peter Ghonta sempat membeberkan berbagai masalah di tubuh perseroan dengan kode saham GIAA pada Oktober 2021 lalu. Ia membuka permasalahan terkait ada kelompok-kelompok yang berkuasa, selisih harga sewa pesawat Boeing 777-300ER hingga pembelian pesawat CRJ1000.

Peter mengaku sudah melaporkan persoalan yang melanda maskapai Garuda kepada sejumlah lembaga mulai dari Dirjen Kemenkumham hingga Ketua KPK. (Fu)-d

Program Adopsi Anak Telantar Kalah dengan 'Boneka Arwah'

JAKARTA (KR) - Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyayangkan kurangnya program orangtua asuh bagi anak-anak telantar dibandingkan dengan mengadopsi 'boneka arwah'.

"Kelihatannya program Pemerintah ini kurang populer di tengah masyarakat, sehingga ada masyarakat yang membandingkan dan menyayangkan fenomena menjadi orangtua dari 'boneka arwah' dengan kebutuhan daftar orangtua pengganti di negara ini," kata Jasra melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (11/1).

Padahal, menurut Jasra Putra, Pemerintah mencatat pada 2020 ada 67.368 anak telantar di Indonesia dan terus bertambah seiring adanya kasus bayi dibuang atau telantar. Selain itu terdapat juga anak-anak yang kehilangan orangtua secara mendadak selama pandemi Covid-19 yang jumlahnya mencapai 30.766 anak.

Menurutnya, selain karena meninggalnya orangtua akibat bencana, anak-anak dapat menjadi telantar karena berbagai masalah keluarga atau terlibat permasalahan hukum. "Belajar dari beberapa bencana alam dan bencana pandemi, anak-anak yang mendadak kehilangan orangtua, artinya perlu mendapatkan segera pengganti keluarga. Begitu pun anak yang kehilangan orangtua karena perceraian, orangtua berhadapan dengan hukum, anak dalam masa pidana, anak dalam lembaga pengasuhan atau lembaga serupa yang menjadikan anak diasuh di luar keluarga," katanya.

Jasra mengatakan, anak-anak telantar ini butuh kehadiran orangtua dalam keluarga yang harmonis. "Mereka butuh kehadiran, yang layaknya orangtua bagi mereka agar dapat perhatian penuh dalam tumbuh kembangnya. Karena anak-anak yang terlepas dari keluarga diyakini bisa berkembang baik, bila pengasuh penggantinya menerapkan sistem keluarga," katanya. (Ant)-f

JAKSA AGUNG-MENTERI BUMN BERTEMU

Bahas 'Bersih-bersih' di BUMN

JAKARTA (KR) - Jaksa Agung Sanitair Burhanuddin menegaskan komitmen Kejaksaan Agung dalam mendukung upaya Kementerian BUMN untuk melakukan 'pembersihan' di Kementerian itu, khususnya terhadap oknum pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan usai bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir yang mendampingi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Dalam mengambil langkah-langkah, kami selalu koordinasi. Bagaimana pun, sinergitas antara kami (Kejaksanaan Agung) dengan BUMN harus tetap terjaga," kata Burhanuddin kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1).

Ia mengatakan demikian setelah melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam kunjungannya ke Gedung Kejaksaan Agung guna melaporkan kasus yang melanda maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Berita di bagian lain halaman ini). Burhanuddin menyebutkan, dalam pertemuan ini terdapat tiga pembahasan yang ia lakukan bersama Erick Thohir.

"Yang pertama adalah restrukturisasi Garuda Indonesia. Sedang yang kedua adalah laporan Garuda untuk pembelian (pesawat) ATR 72-600, dan juga, ini yang utamanya, adalah dalam rangka kami

mendukung Kementerian BUMN," jelas Burhanuddin.

Dalam kesempatan ini Erick Thohir menegaskan sinergitas antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian BUMN tidak hanya untuk menangkap dan menghukum oknum-oknum yang terlibat. Akan tetapi juga untuk memperbaiki administrasi secara menyeluruh di Kementerian BUMN.

"Ini sesuai dengan program yang kami dorong, yaitu transformasi dan bersih-bersih BUMN," kata Erick Thohir seraya menambahkan, selain membahas mengenai rencana pemerintah yang ingin melakukan restrukturisasi Garuda Indonesia, juga memberikan sejumlah bukti terkait pengadaan pesawat ATR 72-600.

"Kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Jadi, bukan tuduhan karena kita eranya tidak lagi saling menuduh, tetapi mesti ada fakta yang diberikan," tuturnya.

Erick menegaskan, pihaknya sedang melakukan upaya pembersihan berbagai perusahaan pelat merah dari indikasi pelanggaran hukum, salah satunya Garuda Indonesia. "Saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan dan inilah tujuan utama kami terus menyerahkan BUMN tersebut," katanya. (Fu)-f

JADI INISIATIF DPR

RUU TPKS Disahkan 18 Januari 2022

JAKARTA (KR) - Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada 18 Januari 2022. Selanjutnya, akan dibahas Bersama pemerintah.

"Insya Allah, hari Selasa, 18 Januari 2022, akan dapat disahkan menjadi RUU inisiatif DPR," kata Puan disambut tepuk tangan meriah para anggota DPR.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/1).

"RUU TPKS, telah menjadi RUU inisiatif DPR RI dan menjadi prioritas pada masa sidang ini. Penyusunan naskah dan harmonisasi RUU TPKS telah selesai dilakukan di Baleg DPR RI," ujar Puan.

Ia menegaskan dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini, RUU TPKS telah menjadi kebutuhan hukum nasional yang perlu segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR RI

bersama pemerintah.

Selain itu, DPR mengapresiasi sikap presiden yang memandang, kehadiran RUU TPKS sudah sangat diperlukan, untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya perempuan.

Ia berharap RUU TPKS dapat memperkuat perlindungan dari tindakan kekerasan seksual dan juga mempertajam paradigma untuk berpihak kepada korban.

Sesuai mekanisme pembentukan Undang-Undang, persetujuan pembahasan lebih lanjut sebuah RUU diputuskan dalam rapat paripurna. Jika nantinya disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.

Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus. Selanjutnya, pembicaraan tingkat II dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. (Sim)-f

VAKSINASI ANAK 6-11 TAHUN

Jawa-Bali Capai 36 Persen

JAKARTA (KR) - Pemerintah terus meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 di seluruh Tanah Air, termasuk vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi bagi anak sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).

"Dosis pertama untuk anak-anak, dosis di Jawa-Bali sudah mencapai 36 persen. Dari pencapaian tersebut Pemerintah masih belum puas dan kita ingin mendorong lagi agar jumlah vaksinasi anak-anak terus meningkat," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (11/1).

Luhut mengungkapkan, cakupan vaksinasi di wilayah Jawa-Bali terus meningkat. Ini tidak terlepas dari kerja keras jajaran Pemerintah didukung TNI dan Polri. "Capaian dosis pertama dan kedua vaksinasi di wilayah Jawa-Bali terus meningkat. Ini kerja keras Menteri Kesehatan dengan TNI-Polri," ujarnya.

Luhut menegaskan, Pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi, terutama di kabupaten/kota dengan capaian vaksinasi dosis pertama yang masih di bawah 50 persen. Diungkapkannya, saat ini terdapat dua kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali dengan capaian dosis pertama masih di bawah 50 persen. (Sim)-f

WILAYAH BARLINGMASCAKEB

Berpotensi Hujan Lebat-Angin Kencang

PURWOKERTO (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb).

"Dari pantauan gradien (kemiringan) angin permukaan, saat ini terdapat pola angin siklonik di Samudera Hindia Selatan Jawa Timur serta adanya tekanan udara rendah di Australia bagian Utara," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (11/1).

Selain itu, kata Teguh Wardoyo, daerah pertemuan angin juga terdapat di sekitar Jawa Barat dan Jateng. Kondisi tersebut memicu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang di beberapa wilayah terutama di Jateng,

khususnya Barlingmascakeb.

"Kecepatan angin diperkirakan juga mengalami peningkatan. Data di Stasiun Meteorologi (Stamet) Tunggul Wulung kecepatan angin maksimum siang ini per pukul 14.48 WIB tercatat 22 knot dan di Bandara Tunggul Wulung Cilacap mencapai 24 knot," katanya.

Terkait hal itu, Teguh mengimbau masyarakat Barlingmascakeb untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. "Prediksi hujan masih tetap ada sampai akhir pekan, dominasinya hujan ringan hingga sedang karena saat sekarang masih musim hujan," kata Teguh.

Informasi yang dihimpun, hujan lebat disertai angin kencang mengguyur sejumlah wilayah Barlingmascakeb pada Selasa (11/1) siang, salah satunya di Desa Matenggeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap. Bahkan, dalam rekaman video

yang dikirimkan staf Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Wilayah Siaga Bencana Cilacap (grup WhatsApp yang dikelola BPBD Kabupaten Cilacap), angin kencang yang berbarengan dengan hujan lebat telah merusak atap tempat parkir kendaraan di Kantor Desa Matenggeng.

Saat dihubungi melalui saluran telepon, Basuki Rahmat mengatakan, hujan lebat disertai angin kencang di Desa Matenggeng yang berbatasan dengan Jawa Barat itu terjadi sejak pukul 13.30 WIB. "Hanya atap tempat parkir di Kantor Desa Matenggeng yang kabur. Sampai saat ini situasi masih aman dan terkendali," katanya.

Sementara di Purwokerto, hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi sejak pukul 13.30 WIB dilaporkan merobohkan kanopi salah satu toko tekstil di Jalan Jenderal Soedirman dan tidak sampai menimpa warga di sekitarnya. (Ant)-f

ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

Rakernas Baznas Hasilkan 'Risalah Yogyakarta'

YOGYA (KR) - Rapat Kerja Nasional Badan Amil Zakat Nasional (Rakernas Baznas) yang berlangsung di Hotel Melia Purosani sejak Senin (10/1) menghasilkan 'Risalah Yogyakarta'. Risalah tersebut dibaca para pimpinan Baznas Provinsi se-Indonesia dipimpin KH Ahmad Daroqi (Ketua Baznas Jateng) pada acara penutupan, Selasa (11/1).

"Semoga kita bisa melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam 'Risalah Yogyakarta' sehingga membawa berkah bagi masyarakat luas, khususnya para korban bencana di Indonesia," kata Hj Saidah Sakwan (salah satu pimpinan Baznas RI) saat menutup Rakernas.

Rakernas diawali dengan seminar nasional menghadirkan para pakar terkait, antara lain KH Ma'ruf Cholil Nainis Ketua MUI. Sedang pembukaan



KR-Istimewa

Pembacaan 'Risalah Yogyakarta'

dilakukan di Bangsal Kepatihan oleh Ketua Baznas RI Prof KH Noor Ahmad pada acara Gala Dinner yang dihadiri Wakil Gubernur DIY KGPA Paku Alam X.

Poin 'Risalah Yogyakarta' antara lain menyebutkan, Baznas menjadikan setiap bencana sebagai peristiwa kemanusiaan yang menguatkan kohesi sosial dan solidaritas nasional untuk pengen-

tan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahil. Baznas seluruh Indonesia melakukan kolaborasi untuk penanggulangan bencana pada fase pengurangan risiko, tanggap darurat dan pemulihan bencana sebagai bentuk pengamalan salah satu bentuk maqosid syariah yaitu hidfzu nafsu (menjaga nyawa).

Selain itu, Baznas selu-

ruh Indonesia menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam rangka memperkuat program penanggulangan bencana. Juga mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lain (DSKL) sebesar-besarnya untuk mengurangi kemiskinan baru yang diakibatkan kejadian bencana.

Baznas seluruh Indonesia juga memperkuat koordinasi multipihak dan jejaring strategis antar kementerian/lembaga pemerintah, organisasi pengelola zakat, dan organisasi lainnya yang sejalan dengan visi-misi Baznas. Juga membangun tata kelola dan sistem informasi pusat kendali operasi kebencanaan untuk efektivitas dan efisiensi program penanggulangan bencana. (Fie)-d